

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN ARAB SAUDI DENGAN NEGARA SEKUTU DARI BARAT AMERIKA SERIKAT

Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai dinamika hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat sebagai negara sekutu dari barat. Di mana akan dimulai dengan profil Arab Saudi, sejarah terbentuknya Negara Arab Saudi, perekonomian Arab Saudi, pendidikan, sistem pemerintahan hingga garis besar kebijakan luar negeri. Kemudian akan dilanjutkan dengan dinamika kerjasama Arab Saudi dan Amerika Serikat hingga saat ini.

A. Arab Saudi

Gambar 2.1 Peta Arab Saudi



Sumber: Chughtai, A. (2017, May 18). *US-Saudi Relations: A timeline*. Retrieved December 1, 2018, from [www.aljazeera.com](https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2017/05/saudi-relations-timeline-170518112421011.html):
<https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2017/05/saudi-relations-timeline-170518112421011.html>

Gambar 2.2 Bendera Arab Saudi



Sumber: Chughtai, A. (2017, May 18). *US-Saudi Relations: A timeline*. Retrieved December 1, 2018, from www.aljazeera.com:
<https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2017/05/saudi-relations-timeline-170518112421011.html>

Kerajaan Arab Saudi (*Kingdom of Saudi Arabia/Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyyah*) atau yang sering dikenal dengan Arab Saudi merupakan negara di kawasan Timur Tengah yang terletak di antara 15°LU - 32°LU dan antara 34°BT - 57°BT. Di Semenanjung Arab di antara Laut Merah di sebelah barat (1.760 km) dan Teluk Arab di sebelah timur (560 km). Negara terbesar di semenanjung Arab yang beribukota di Riyadh ini memiliki luas wilayah sekitar 4/5 semenanjung Arab atau seluas 2.250.000 km² dengan populasi 27 juta jiwa, termasuk 8,4 juta penduduk asing. Daratan yang ada di Arab Saudi terdiri dari padang bebatuan dan berpasir, dataran tinggi, sedikit dataran rendah, dan pegunungan. Di Arab Saudi pun tidak terdapat aliran sungai ataupun danau permanen (Profil Negara Kerajaan Arab Saudi).

Arab Saudi ialah negara monarki yang dipimpin oleh seorang raja. Raja yang memimpin Arab Saudi tahun 2019 ini ialah Raja Salman Bin Abdul Aziz Al Saud yang diangkat pada tahun 2015 silam dengan Putera Mahkota anaknya sendiri yaitu

Muhammad Bin Salman atau yang sering disebut dengan MBS. Negara Islam yang berdasar pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah ini cukup dikenal sebagai negara kaya karena terdapat cadangan minyak bumi yang cukup besar di negara tersebut. Minyak pun menjadi sarana pendapatan ekonomi terbesar di Arab Saudi. Selain minyak, Arab Saudi juga unggul dalam peradaban Islam di mana memiliki Ka'bah yang tiap tahunnya dikunjungi oleh jutaan umat Islam diseluruh penjuru dunia (Profil Negara Kerajaan Arab Saudi).

1. Sejarah Arab Saudi

Arab Saudi yang terletak di antara dua peradaban besar yaitu Lembah Sungai Nil dan Mesopotamia menjadikan semenanjung Arab sebagai persimpangan jalan dunia kuno. Kurang dari 100 tahun setelah kelahiran Islam, kekaisaran Islam meluas dari Spanyol ke beberapa bagian seperti India dan China. Meski pusat-pusat kekuasaan politik yang telah berpindah dari semenanjung Arab. Perdagangan pun berkembang di daerah tersebut. Kerajaan Islam berkembang cukup pesat hingga abad ke-17. Tetapi ketika kerajaan tersebut pecah menjadi beberapa kerajaan kecil, semenanjung Arab secara pelan memasuki periode isolasi relatif. Di mana meskipun begitu Mekkah dan Madinah tetaplah menjadi jantung dunia Islam yang menarik perhatian dunia (Epimetheus, 2017).

Awal abad ke-18 Muhammad bin Abdul Wahhabi dan Muhammad bin Saud memulai kesepakatan untuk mengembalikan ajaran Islam yang murni kepada komunitas muslim. Dengan hal itu, Muhammad bin Saud mendirikan Negara Saudi Pertama yang makmur di bawah petuah Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikenal sebagai Syaikh. Kemudian pada tahun 1788 Negara Saudi memerintah seluruh dataran tinggi pusat yang dikenal dengan nama Najd hingga pada awal abad ke-19 Negara Arab memiliki

kekuasaan di sebagian besar semenanjung Arab termasuk Mekkah dan Madinah (Epimetheus, 2017).

Pada tahun 1818 Kekaisaran Ottoman mulai mengirim pasukan ke Diriyah untuk mendominasi kekuasaan di semenanjung Arab dan Afrika Utara. Tetapi tak lama dari itu, keluarga Al-Saud mulai berusaha melawan dan merebut kembali semenanjung Arab hingga pada tahun 1824 mendapatkan kembali kekuatan politik Arab Tengah. Penguasa Saudi, Turki bin Abdullah Al-Saud memindahkan ibukota Arab dari Diriyah ke Riyadh yang berjarak sekitar 20 mil selatan Diriyah yang kemudian mendirikan negara Arab kedua. Selama 11 tahun masa pemerintahannya, Turki berhasil mendominasi kekuasaan dan menghilangkan jejak Ottoman. Turki memastikan rakyatnya mendapatkan hak-haknya kembali dan hidup dengan makmur (The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia).

Negara Arab di bawah kepemimpinan Turki dan putranya, Faisal, menikmati masa makmur dan damai serta perdagangan dan pertanian kian berkembang. Tetapi kehancuran mulai terjadi lagi ketika muncul kampanye baru Ottoman untuk memperluas kerajaan Timur Tengah di semenanjung Arab pada tahun 1865. Dengan adanya kampanye baru Ottoman yang pada saat itu Negara Arab di bawah perintah putra dari Faisal yaitu Abdulrahman bin Faisal Al-Saud terpaksa meninggalkan perjuangannya pada tahun 1891 dan mencari perlindungan di padang pasir Arabia Timur yaitu Rub 'Al-Khali, atau "Kuartal Kosong" dengan bantuan suku-suku Badui. Dari Kuartal Kosong tersebut, Abdulrahman dan keluarganya melakukan perjalanan ke Kuwait di mana mereka menetap di sana hingga tahun 1902. Dengan putra Abdulrahman yaitu Abdulaziz yang sangat bertekad untuk merebut kembali warisannya hingga pada tahun 1902 Abdulaziz dengan ditemani oleh 40 temannya pawai menuju Riyadh dan menetap di sana. Selama menetap di sana

Abdulaziz mulai melancarkan aksi merebut semua Hijaz termasuk Mekkah dan Madinah pada tahun 1924 hingga 1925. Dan pada tanggal 23 September 1932 negara Arab dinamai dengan Kerajaan Arab Saudi. Negara Islam dengan bahasa arab sebagai bahasa nasionalnya dan Alquran sebagai konstitusinya. Abdulaziz Al-Saud menjabat sebagai Raja pertama dengan periode 1932 hingga 1953 (The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia).

2. Ekonomi dan Perdagangan Arab Saudi

Arab Saudi merupakan negara dengan ekonomi pasar bebas yang telah mengalami perubahan dalam kurun waktu yang cukup singkat. Pada tahun 1932 ketika kerajaan Arab Saudi modern mulai didirikan oleh Raja Abdulaziz bin Abdulrahman Al-Saud, masyarakat masih bergantung dengan pertanian dan belum memiliki infrastruktur yang mumpuni untuk mendukung jenis pertumbuhan ekonomi yang di harapkan Raja Abdulaziz pada masa itu. Hingga setelah penemuan minyak dengan jumlah yang cukup banyak pada tahun 1938 mengubah semua itu. Pasca Perang Dunia II, ekspor minyak yang dilakukan Arab Saudi cukup stabil untuk menyediakan infrastruktur dasar jalan, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, dan bandara (The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia).

Negara di semenanjung Arab ini merupakan perodusen dan pengeksport minyak terbesar dunia, dan minyak bumi menjadi komponen utama pembangkitan ekonomi negara. Arab Saudi pun menjadi negara terbuka dalam hal ekonomi, negara ini bergabung dengan *World Trade Organisation* (WTO) pada tahun 2005 di mana menjadikan perkembangan yang cukup memberi akses lebih besar untuk produk-produk Saudi ke pasar global serta menciptakan lapangan kerja. Selain itu bergabungnya Saudi dengan WTO juga memberi peluang negara untuk mendorong investasi

asing yang tentunya akan semakin meningkatkan pendapatan negara. Kerajaan telah mengambil langkah-langkah untuk mendiversifikasi perekonomian negara agar tidak terus menerus bergantung pada minyak. Saat ini, produksi industri kerajaan menghasilkan lebih dari 90% ekspor non minyak seperti petrokimia, barang logam, plastik, bahan konstruksi serta peralatan listrik (Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Foreign Affairs).

3. Pendidikan di Arab Saudi

Sistem pendidikan di Kerajaan Arab Saudi memiliki sekitar 24.000 sekolah dan perguruan tinggi serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya. Sistem pendidikan ini terbuka bagi setiap warga negara serta mereka akan mendapatkan pendidikan, buku, dan layanan kesehatan gratis. Untuk pendidikan ini, pemerintah mengalokasikan lebih dari 25% total anggaran untuk pendidikan (Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Foreign Affairs).

4. Sistem Pemerintahan

Arab Saudi merupakan negara monarki dengan pemimpin seorang raja. Arab Saudi juga di definisikan sebagai negara berdaulat Arab dan Islam dengan agamanya adalah Islam dan konstitusinya adalah Alquran dan Sunnah. Negara Islam ini memiliki wilayah administrasi yang berjumlah tiga belas di mana masing-masing wilayah dipimpin oleh dewan dan gubernur daerah yang bertugas untuk mengatasi masalah yang terjadi di pada masyarakat di wilayah masing-masing. Dalam hal ini, raja juga berperan sebagai perdana menteri. Di mana bertugas memastikan penerapan syariah dan kewajiban umum negara. Selain itu, juga mengawasi perlindungan dan pertahanan negara. Raja bertugas mengangkat Putra Mahkota yang dibantu oleh dewan menteri. Sedangkan tugas dewan menteri selain untuk membantu raja, juga bertugas

untuk menasehati raja dan memfasilitasi pembangunan negara. Dewan menteri di sini biasa juga disebut sebagai kabinet. Kabinet yang terdiri dari Perdana Menteri (Raja), Wakil Perdana Menteri (Putra Mahkota), para Menteri. Kabinet bertanggung jawab atas penyusunan dan pengawasan implementasi internal, eksternal, keuangan, ekonomi, pendidikan, pertahanan, serta urusan umum negara. Kabinet didirikan pada tahun 1953 oleh Raja Saud, direstrukturisasi oleh Raja Fadh pada tahun 1993 dan Raja Salman pada tahun 2015 (Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Foreign Affairs).

5. Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi

Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi selalu berfokus pada empat pilar utamanya yaitu, integritas wilayah, perlindungan rezim, kemakmuran ekonomi, dan pelestarian bentuk pemerintahan monarki Islam. Arab Saudi beranggapan bahwa memperkuat sekutu-sekutu di seluruh dunia merupakan hal sangat penting bagi kelangsungan kemakmuran negara. Dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, Arab Saudi sering mengandalkan *Checkbook Diplomacy* dan bantuan dari AS yang merupakan negara sekutunya. *Checkbook Diplomacy* sendiri merupakan kebijakan luar negeri suatu negara yang dengan terang-terangan menggunakan pemberian bantuan ekonomi untuk negara lain untuk mendapatkan *Diplomatic Favor* (Pertolongan Diplomasi). Dengan keadaan spesial yang dimiliki oleh Arab Saudi yaitu kekayaan minyak, menyebabkan negara ini dengan mudah membeli *Diplomatic Flavor* dari negara lain di seluruh dunia bahkan pada musuh-musuh yang sempat berseteru dengannya. Tak ayal juga hal tersebut berpotensi menjadi *boomerang* bagi negara tersebut (Al-Shihabi, 2017).

Dalam hal ini, Arab Saudi percaya bahwa perdamaian dengan negara-negara lain sangatlah penting sebagai jalan membuka kerjasama di bidang ekonomi. Di mana salah satu pilar kebijakan luar negeri Arab Saudi yaitu kemakmuran ekonomi yang saat ini menjadi langkah Arab Saudi melalui hubungan ekonominya dengan China yang semakin erat. Arab Saudi memang memiliki negara sahabat *super power* dari barat yaitu AS yang tentunya dapat membantu perekonomian negara yang kian menurun. Tetapi Saudi beranggapan bahwa akan lebih baik lagi bila kerjasama dilakukan dengan negara adidaya ekonomi lain seperti China. Dengan menggandeng dua negara yang unggul dalam perekonomian dari barat dan timur tersebut memberi peluang Arab Saudi untuk membangun ekonomi yang sempat merosot karena turunnya harga minyak (Middle East Policy Council).

B. Dinamika Hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat

Hubungan Arab Saudi dan AS cukup mengalami fluktuasi. Perjalanan hubungan kedua negara yang sudah terjalin selama lebih dari 70 tahun ini tentu mengalami masalah di beberapa faktor. Seperti perbedaan keinginan, perbedaan tujuan, atau perbedaan pendapat dan cara pandang akan suatu hal. Tetapi kedua negara ini saling membutuhkan satu sama lain hingga menciptakan jalinan aliansi. Perbedaan pun tidak menutupi kemungkinan keduanya untuk menjalin tali persahabatan. Saudi yang merupakan negara Islam sunni dan konservatif, sedangkan AS yang merupakan negara kapitalis liberal yang memiliki agama Islam minoritas (Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Foreign Affairs).

1. Hubungan Arab Saudi dan AS yang Bermula dari Minyak

Arab Saudi merupakan negara monarki yang berdiri di kawasan Timur Tengah dengan perekonomian cukup menonjol karena terdapat cadangan minyak bumi di negara tersebut. Meskipun

Arab Saudi adalah negara Monarki, tidak menutup kemungkinan untuk Arab Saudi bekerjasama dengan negara lain. Salah satunya adalah kerjasama dengan AS. Hubungan kedua negara tersebut berawal di tahun 1930 di mana keduanya di rasa saling membutuhkan satu sama lain dan mulai mengarah ke kerjasama antar kedua negara. Arab Saudi yang membutuhkan pasokan senjata dari AS dan AS yang membutuhkan pasokan minyak dari Arab Saudi. (Zakaria, 1998)

Kedekatan Arab Saudi dan AS yang bermula pada tahun 1930 tersebut membawa keduanya kearah yang lebih erat yaitu kerjasama energi yaitu minyak. Pada tahun yang sama Arab Saudi sempat memiliki hubungan yang spesial dengan Britania Raya karena telah memberikan bantuan kepada pemimpin Saudi pada saat itu yaitu Abdulaziz untuk memerdekakan diri dari Turki Utsmaniyah di era Perang Dunia I. Tetapi keeratan hubungan keduanya mulai berkurang lantaran pada akhir tahun 1930 an Britania Raya memberikan dukungan kepada keluarga Hashimiyyah yang berkuasa di Yordania dan Irak. Abdulaziz tidak menyukai hal tersebut karena memandang kedua negara yang dikuasai oleh Hashimiyyah sebagai ancaman nyata setelah keluarga Saud berhasil menaklukkan Mekkah dan Madinah. Karena hal tersebutlah Arab Saudi mulai melancarkan aksi untuk mencari sekutu baru yang cukup menguntungkan yaitu AS. Arab Saudi mulai meningkatkan hubungan dengan AS dan mengizinkan AS membangun serta menggunakan pangkalan udara di Dammam (Gresh, 2015).

Sekitar tahun 1932 Raja Abdulaziz Al-Saud menyetujui dan menandatangani konsesi dengan *Standard Oil of California* (SOCAL) yang sekarang ini telah dikenal sebagai Chevron yang mengeksplorasi sumber minyak di Saudi bagian timur. Setelah berkembang akhirnya SOCAL membangun cabang perusahaan tersebut di Arab Saudi dengan nama

California Arabian Standard Oil Company (CASOC). Kemudian dengan beruntungnya, CASOC berhasil melakukan penemuan minyak besar di provinsi timur Arab Saudi yaitu Dammam pada tahun 1938. Setelah penemuan besar tersebut muncul penemuan-penemuan sumber minyak lainnya yang menjadikan Arab Saudi sebagai sumber minyak terbesar di dunia. Pada tahun 1944 didirikan lah perusahaan minyak asal Kalifornia yaitu ARAMCO. Kemudian diperluas untuk memasukkan Exxon dan Mobil (Hart, 1999).

Minyak yang merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia menjadikan AS dengan senang hati bekerjasama dengan Arab Saudi mengenai minyak tersebut. Hubungan keduanya semakin meningkat karena peran minyak pada masa Perang Dunia II di mana AS pada saat itu dipimpin oleh Franklin D. Roosevelt. Roosevelt menyadari minyak sangatlah penting sehingga tidak akan melepas kesempatan menggandeng Arab Saudi sebagai sekutu. Kemudian pada Februari 1945 Roosevelt melancarkan pertemuan rahasia dengan Raja Abdulziz Al Saud mengenai kelanjutan dari kerjasama minyak kedua negara tersebut di atas kapal USS Quincy yang sedang berlayar di tengah-tengah Terusan Suez tepat setelah diadakannya konferensi Yalta. Konferensi Yalta sendiri merupakan konferensi yang diadakan pada masa Perang Dunia II tanggal 4-11 Februari 1945 yang dihadiri oleh pemimpin dari AS, Uni Soviet, dan Britania Raya. Pertemuan dengan Raja Abdulaziz tersebut membuahkan hasil yang mengesankan, sejak hari itu AS mendapat konsesi selama enam puluh tahun untuk menjelajah minyak dari Arab Saudi (Mantle, 1996).

Hubungan Arab Saudi dan AS yang dilihat saling menguntungkan ini rupanya tidak berjalan mulus dan mulai terjadi hambatan. Pasca pembentukan OPEC pada tahun 1960 hubungan keduanya mulai memburuk.

Arab Saudi yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Saud bin Abdulaziz Al-Saud mengambil keputusan tegas untuk melakukan embargo minyak kepada AS yang di anggap Saudi telah memberi dukungan untuk Israel dalam perang melawan Mesir dan Suriah pada masa itu. Dengan dilakukannya embargo minyak oleh Arab Saudi menyebabkan terjadinya *Oil Shock* negara-negara yang melakukan impor minyak dari Saudi karena, Saudi tak hanya mengembargo minyak kepada AS namun juga kepada negara-negara lain seperti Israel dan Inggris. Dampaknya pun cukup mengejutkan dunia dengan naiknya harga minyak sekitar 70% (Bronson, 2006).

Namun hubungan kedua negara kembali harmonis pada masa kepemimpinan Faisal bin Abdulaziz Al-Saud tahun 1974 embargo yang dilakukan oleh Arab Saudi telah dihentikan. Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri AS pada masa itu melakukan negosiasi dengan dan memberikan hasil gencatan senjata antara Israel dan Suriah. Arab Saudi mulai melunak kepada AS dan mulai menjalin kerjasama yang terjalin sebelumnya. Selain itu, Arab Saudi juga membutuhkan dukungan dari AS untuk membantu Saudi membendung pengaruh Iran di Timur Tengah. Arab Saudi beranggapan bahwa Iran merupakan ancaman bagi Saudi, Arab Saudi dan Iran sudah lama berseteru karena perbedaan ideologi. Arab Saudi dengan Islam Sunni dan Iran dengan Islam Syiah. Dengan semakin kuatnya pengaruh Iran di Timur Tengah menyebabkan ideologi yang disebarkan Saudi mulai tertinggalkan. Karena hal itu, Arab Saudi tidak bisa tinggal diam dan segera mencari tindakan. Dengan menggandeng AS lah Arab Saudi mulai merasa unggul dan menjadi negara terkuat di Timur Tengah. Dukungan dari AS pun berupa pasokan senjata ke Arab Saudi, dan sebagai gantinya Arab Saudi memberikan

pasokan minyak ke AS. Hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain (Quandt, 1981).

2. Perang Dingin Semakin Mengakrabkan Arab Saudi dan AS

Ketika Perang Dingin berlangsung, peran Arab Saudi sebagai sekutu AS dari Timur Tengah terlihat semakin jelas. Pasalnya, pangkalan udara Arab Saudi di Dhahran yang berada di dekat lubang minyak Dammam merupakan tempat yang strategis bagi AS untuk menyerang Uni Soviet, karena jarak pangkalan udara ini dekat dengan perbatasan Uni Soviet. Pangkalan udara Dhahran tersebut dijadikan sebagai tempat strategis untuk tempat transit persenjataan AS ketika Soviet menginvasi Afghanistan pada tahun 1979. AS beranggapan bahwa peran Arab Saudi sebagai dinding untuk menahan pengaruh Iran dan Soviet di Timur Tengah sangatlah penting. Dengan kesempatan AS diperbolehkan menerbangkan pesawatnya di wilayah udara Arab Saudi, menjadikan aset penting karena dengan begitu Soviet tidak akan memiliki akses untuk menerbangkan pesawat di wilayah udara Arab Saudi dan semakin mempersulit pengaruhnya di Timur Tengah. Walaupun Arab Saudi yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Khalid bin Abdulaziz Al-Saud memilih netral di Perang Dingin, tetapi kerajaan tetap memperbolehkan AS menggunakan wilayahnya. AS memandang Arab Saudi sebagai sekutu dari Timur Tengah yang menjanjikan melihat banyak keuntungan yang didapat oleh AS dari hubungan keduanya ini (Beonson, 2008).

Selain itu, AS memprioritaskan untuk memberikan keamanan wilayah Teluk Persia yang kaya akan minyak sejak Perang Dunia II. Hal tersebut dilakukan AS tentu karena produksi minyak di daerah tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan-perusahaan pengelolaan minyak milik AS selama tahun

1970an. Di sisi lain, kerjasama AS dan Arab Saudi selain minyak ialah militer. Kerjasama militer AS-Saudi menguat saat pecahnya Perang Teluk pertama. Pada tahun 1991 pasukan yang dipimpin oleh AS mengusir pasukan Irak dari Kuwait. Hampir lebih dari setengah juta pasukan AS membanjiri wilayah tersebut. Tindakan AS tersebut sempat menimbulkan kemarahan di kalangan masyarakat konservatif Saudi karena memperkuat argument mereka bahwa elit Saudi terlalu memberi akomodasi untuk kepentingan Barat dan non-Muslim (Policy, 2018)

Kenyataan bahwa Arab Saudi merupakan negara beragama yang kuat menjadi peluang keuntungan bagi AS sebagai sekutu selain karena minyak dan geografinya. Palsunya, paham Komunisme Soviet cukup tidak sejalan dengan kepercayaan agama. AS melihat bahwa suatu negara dengan agama yang kuat seperti Saudi, menjadi dapat memberi dinding atau pembatas untuk penyebaran paham Komunisme Soviet kala itu dan mulai melirik kehadiran AS. Karena dahulu terdapat anggapan bahwa Komunis tidaklah mungkin memiliki kepercayaan terhadap agama. Dan pemilik kepercayaan terhadap agama secara otomatis akan menjadi anti-komunisme (Beanson, 2008).

3. Hubungan Arab Saudi dan AS Memburuk Setelah Peristiwa 9/11

Pada tanggal 9 September 2001 silam terjadi serangan terorisme di Gedung kembar *World Trade Center* (WTC) dan Pentagon yang memakan banyak korban jiwa. Kejadian yang sering disebut sebagai peristiwa 9/11 tersebut menjadi sejarah yang cukup kelam bagi AS yang pada saat itu dipimpin oleh George W. Bush. Kejadian tersebut menyebabkan hubungan kedua negara Arab Saudi dan AS memburuk. AS melihat bawa keagamaan Saudi yang kuat mulai tidak sesuai untuk dijadikan sebagai alat politik AS.

Pandangan buruk mengenai Islam dan khususnya pada Saudi mulai terjadi di Barat setelah kejadian tersebut. Saudi yang pada saat itu dipimpin oleh Fadh bin Abdulaziz al-Saud pun menyangkal negaranya untuk disalahkan. Hingga kemudian Presiden AS Bush mengeluarkan kebijakan "*War on Terror*" yang kemudian menjadikan Islam dianggap sebagai dalang setiap kejadian terorisme. Saudi tak takut dengan hal tersebut. Negara ini memang cukup membutuhkan AS sebagai sekutu untuk pasokan senjata negara, namun kerajaan ini percaya bahwa hubungannya akan baik-baik saja dengan negara Barat yang menjadi sekutunya ini. Pasalnya setelah kejadian ini pun sebenarnya hubungan keluarga Bush sendiri dengan Raja Fadh masih baik-baik saja. Tentu hal tersebut memberi Saudi helaan nafas lega bahwa ia tidak akan kehilangan sekutu kuatnya dari Barat tersebut (Niblok, 2006).

4. Normaisasi Hubungan Arab Saudi dan AS Pada Masa Kepemimpinan Raja Abdullah bin Abdulaziz Al-Saud

Ketegangan hubungan Arab Saudi dan AS akibat peristiwa 9/11 kala itu sudah mulai surut saat Arab Saudi dipimpin oleh Raja Abdullah bin Abdulaziz Al-Saud dan AS dipimpin oleh Barack Obama. Kemampuan Obama yang mulai mendekati Saudi lagi sebagai sekutunya ini sebenarnya cukup mendapatkan respon baik dari pihak Saudi. Namun keduanya masih memiliki kejanggalan dalam menghadapi suatu masalah yaitu keputusan apakah pesawat Israel diperbolehkan melintas di kawasan udara Saudi. Sedangkan, Raja Abdullah sangat menentang hal tersebut mengingat kekejian Israel terhadap Palestina. Bahkan, Saudi mengajak negara-negara anggota Liga Arab untuk turut melarang adanya hubungan dengan Israel sebelum Israel mau menyerah dan kembali ke negaranya dengan damai sebelum perang yang terjadi

selama enam hari pada tahun 1967 silam (Lippman, 2012).

Saudi memandang AS mulai menunjukkan tanda-tanda dukungan terhadap Israel mengenai izin penerbangan pesawat Israel di wilayah udara Saudi. Karena kendala kecil tersebut, hubungan dagang keduanya yang cukup besar mulai menurun. Padahal, AS merupakan mitra dagang besar bagi Saudi kala itu. Tetapi Saudi beranggapan bahwa upaya Obama dalam memperbaiki hubungan keduanya bukan karena Obama memandang Saudi sebagai sekutu yang strategis di mana agama Islam disebarkan dan sebagai tempat yang tepat untuk AS memperbaiki hubungan dengan Islam pasca peristiwa 9/11. Tetapi Saudi menganggap ini ialah trik Obama untuk tetap mendapatkan pasokan minyak dari Saudi karena AS masih sangat membutuhkan impor minyak mentah dari Saudi untuk keberlangsungan negaranya. Terlebih, adanya ketakutan AS dengan kebijakan Saudi yang sedikit demi sedikit menjadi lebih bebas dan terbuka. Arab Saudi adalah tujuan utama bagi penjualan senjata AS. Dengan penjualan pertahanan AS ke Saudi berjumlah sebesar hampir 90 miliar dollar sejak tahun 1950, menurut Pentagon (Cipta, 2011).

Hubungan Arab Saudi dan AS terlihat saling menguntungkan, membutuhkan satu sama lain, terdapat keretakan tetapi kembali bersatu. Walaupun begitu, hubungan keduanya tak selaras sepenuhnya. Pandangan Barat mengenai terorisme misalnya, hal tersebut tetap menjadi label yang akan diingat masyarakat dunia. Secara historis walaupun Saudi dan AS memiliki tujuan Bersama yaitu stabilitas regional dan membendung Iran, tetapi kedua negara tetap memiliki perbedaan dalam masalah inti selama AS pada masa kepemimpinan Obama. Saudi sempat merasa kecewa dengan AS karena tidak adanya dukungan AS terhadap

pemimpin Mesir Hosni Mubarak yang digulingkan (Policy, 2018).

5. Masa Kepemimpinan Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud

Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud atau yang biasa dikenal dengan sebutan “Raja Minyak” ini merupakan pemimpin Arab Saudi yang ke tujuh yang menggantikan raja sebelumnya yaitu Raja Abdullah yang telah wafat pada tanggal 23 Januari 2015 lalu. Raja Salman diangkat sebagai pemimpin Arab Saudi pada tahun 2015 setelah sebelumnya menjabat sebagai gubernur Riyadh sejak tahun 1963. Sang raja memiliki anak yaitu Muhammad bin Salman atau yang biasa disebut sebagai “MBS” yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Kerajaan Arab Saudi. Pada masa kepemimpinannya, Raja Salman sudah disuguhi dengan beban Saudi dalam menangani konflik tetangga yang berkepanjangan yaitu perang Yaman yang dimulai pada tahun 2011 (CNN, 2019).

Perang di Yaman atau yang sering disebut sebagai krisis Yaman terjadi pada tahun 2011 di mana adanya pemberontakan dan gelombang protes masyarakat yang didalangi oleh kaum bernama Houthi menuntut turunnya Presiden Yaman saat itu yaitu Ali Abdullah Saleh. Pada tahun 2015, MBS sebagai Menteri Pertahanan meluncurkan intervensi dalam perang saudara Yaman. Dengan dipimpin oleh Muhammad bin Salman atau yang biasa disebut sebagai “MBS” ini, memperlihatkan pergeseran Saudi yang lebih agresif di wilayah tersebut. Pihak AS yang pada saat itu masih dipimpin oleh Obama memberikan bantuan total kepada Saudi berupa senjata, intelejen, serta pengisian bahan bakar udara untuk membantu pemerintah Yaman memerangi pemberontak Houthi yang dibantu Iran untuk menggulingkan pemerintah Yaman (Republika, 2015)

Kejadian tersebut memakan banyak korban warga sipil hingga mencapai 2000 jiwa dan mengundang perhatian dunia sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Karena hal tersebut Saudi mulai melihat tanda-tanda AS yang mulai sedikit demi sedikit mundur memberikan bantuan pasokan senjata. Beberapa anggota parlemen AS berupaya memblokir sebagian penjualan senjata ke Saudi serta mengurangi partisipasinya dalam perang di Yaman. Tetapi hingga kepemimpinan Trump telah tiba, pasokan senjata untuk Saudi masih dilanjutkan. Campur tangan AS dalam masalah Timur Tengah ini menjadi bukti bahwa hubungan keduanya masih saling membutuhkan. AS tak hanya berurusan untuk membendung Iran, tetapi membantu Saudi menyelesaikan masalah konflik di Timur Tengah misalnya ialah Perang Yaman tersebut (BBC News, 2018)

Aliansi Arab Saudi dan AS selama lebih dari 70 tahun ini dibangun di atas kesepakatan yang sederhana. Yaitu, permintaan AS untuk minyak Saudi dan permintaan Saudi untuk senjata AS. Pada tahun 2016 Presiden Donald Trump yang pada saat itu sedang melakukan kampanye sempat menyatakan bahwa AS telah banyak menghambur-hamburkan uang negara untuk membeli minyak Saudi. Pasalnya impor minyak terbesar AS ialah dari Saudi. Bahkan Trump sempat mengatakan bahwa ia cukup kecewa dengan tindakan pemerintah negaranya yang cukup menganakemaskan Saudi sebagai negara di Timur Tengah. Trump mengatakan bahwa ia akan mengurangi perlindungan terhadap Saudi dan menghentikan impor minyak dari Saudi dengan mengeluarkan kebijakan "*No Saudi Oil Policy*". Menanggapi hal tersebut, respon dari Saudi cukup mengejutkan apabila dilihat dari dampak kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Saudi justru mendukung sepenuhnya keputusan Trump dan tidak mengecam atau menggugat nya. Bahkan seorang

analisis politik Saudi Ahmad Alibrahim sempat memberikan pendapat bahwa:

“Trump ialah seseorang yang bisa dipercaya untuk duduk dan bernegosiasi dengan kerajaan Saudi. Trump adalah orang yang datang kepada Anda dan berkata, ‘Saya membenci Anda, tapi mari kita bicara dan sampai pada kesepakatan.’ Amerika lebih lemah seminggu yang lalu (sebelum pemilihan) dan hari ini lebih kuat” (Young, 2018).

Kebijakan yang disebut sebagai *“No Saudi Oil Policy”* ini rupanya hanya buah bibir saja. Karena, terbukti pada bulan Maret 2017 lalu Presiden Donald Trump mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari Saudi. Pertemuan dengan Trump dihadiri oleh Muhammad bin Salman di mana pada tahun yang sama telah resmi dinobatkan sebagai Putera Mahkota setelah cukup lama mengemban tugas sebagai Menteri Pertahanan Kerajaan Arab Saudi. Diadakannya pertemuan tersebut ialah untuk menetralsir hubungan kedua negara yang sempat tidak satu pemikiran di masa kepemimpinan Barack Obama dan karena keluarnya kebijakan Trump mengenai minyak Saudi. Dengan dilakukannya pertemuan tersebut diharapkan menjadi semakin eratnya hubungan keduanya. Perbaikan hubungan ini pun didukung pula oleh pernyataan *White House* bahwa:

“Trump and Salman had directed their teams to find ways ‘to further strengthen and elevate the United States-Saudi strategic relationship’ on the political, military, security, economic, cultural and social fronts. The two sides agreed to cooperate more in the economic, commercial, investment and energy fields and start a new U.S.-Saudi program worth potentially more than \$200 billion in direct and

indirect investments within the next four years”
(Readout, 2017).

Tidak hanya itu, hubungan kedunya yang di rasa positif untuk kembali dekat lagi ini pun mendapatkan respon yang mendukung pula dari *The American Enterprise Institute* Andrew Bowen. Ia memberi beberapa patah kata bahwa:

“Donald Trump’s presidential campaign was his promise to bring about ‘complete American energy independence’, a promise that won him the unwavering support of the U.S. fossil fuel industry and several key endorsements. After his election, vowing last November, Trump blocks all oil imports from Saudi Arabia. But Saudi Arabia, did not stay on Trump’s list of ‘foes’ for very long. Saudis have expressed optimism about the Trump administration and its ‘America first’ approach to foreign policy. Trump’s disdain for meddling in the internal affairs of foreign nations and his tough, no-nonsense approach to ISIS and Iran are music to their (Arab Saudi’s) ears.” (Bowen, 2017)

Hubungan antara Arab Saudi dan AS pada masa kepemimpinan Raja Salman dan Presiden Donald Trump cukup memperlihatkan keeratan. Banyak kerjasama yang dilakukan kedua negara. Kemudian yang membuat Saudi terlihat spesial ialah Saudi merupakan negara pertama yang dikunjungi Presiden AS Donald Trump sejak menjabat sebagai presiden. Tepat pada tanggal 20 Mei 2017 lalu Presiden Donald Trump berkunjung ke Riyadh menggunakan pesawat Air Force One dan tiba di Bandara Riyadh King Khalid. Kunjungan tersebut disambut oleh Raja Salman sekaligus mengadakan upacara kenegaraan. Trump memaparkan kunjungan tersebut di harap menjadi

tahapan untuk membuktikan bahwa hubungan kedua negara masih baik-baik saja sekaligus menyamakan pemikiran kedua negara serta AS yang memberi dukungan pada *Vision 2030 Saudi*. *Vision 2030 Saudi* sendiri merupakan rencana yang di inisiasikan oleh Putera Mahkota Muhammad bin Salman yang bertujuan untuk menarik investasi global ke Saudi dan berusaha menghentikan ketergantungan penjualan minyak sebagai sumber ekonomi utama negara (Layne, 2018).

Pertemuan antara kedua pemimpin memberikan hasil penandatanganan beberapa perjanjian ekonomi dan bisnis sebesar sekitar US\$ 150 miliar atau sekitar Rp. 1.999 triliun. Perjanjian tersebut sebanyak US\$ 100 miliar dialokasikan untuk pembelian senjata dari AS ke Saudi. Kemudian sisanya ialah dialokasikan untuk kesepakatan bisnis minyak antara perusahaan minyak Saudi ARAMCO dengan perusahaan milik AS. Hal tersebut didukung oleh CEO Saudi ARAMCO Amin Nasser yang mengatakan bahwa:

“We hope that the agreement signed today provides an impetus to increase bilateral trade between the two countries”

Kerjasama kedua negara ini termasuk rencana Jacobs Engineering Group Inc dengan Saudi ARAMCO yang nantinya untuk mengelola proyek bisnis yang bergerak di Saudi dan rencana McDermott International mengirim fasilitas untuk pembuatan kapal yang nantinya akan dibangun oleh Saudi ARAMCO. Saudi memandang adanya keuntungan dari kerjasama kedua negara ini karena akan semakin menarik modal dan teknologi yang datang dari AS ke Saudi. Menteri Energi Arab Saudi Khalid Al-Falih pun turut memberikan dukungan melalui kata-katanya:

“We want foreign companies to see Saudi Arabia as an export platform to other markets”
(Young, Masa Depan Hubungan Bilateral Saudi-AS dan Kerjasama Ekonomi, 2018).

Pada kunjungan tersebut pula, Raja Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud memberikan medali emas kepada Presiden AS Donald Trump sebagai penghargaan untuk orang nomor satu di AS tersebut. Selain kesepakatan bisnis minyak dan persenjataan, pertemuan kala itu juga merupakan tawaran AS untuk Saudi mengenai penanaman modal untuk Blackstone Group. Blackstone Group sendiri merupakan perusahaan *Private Equity* yang cukup besar dan bermarkas di New York City. Perusahaan ini menghasilkan produk perbankan dan didirikan pada tahun 1985. Mengenai penanaman modal ini, Saudi menyepakatinya senilai US\$ 20 miliar atau sekitar Rp 266 triliun melalui Lembaga investasi *Public Investment Fund* (PIF). Dana dari Saudi yang masuk melalui investasi Blackstone Group ini digunakan sebagai modal proyek-proyek infrastruktur di AS. Kerjasama ini cukup menguntungkan bagi AS karena donor dana dari Saudi mampu mendongkrak penyediaan infrastruktur dan lapangan pekerjaan AS yang merupakan salah satu janji Presiden Donald Trump sewaktu dulu melakukan kampanye pemilihan (Jeremy Diamond, 2018)

Selain di tahun 2017, pada tahun 2018 pun hubungan keduanya masih erat dan tetap melanjutkan kerjasama-kerjasama yang mereka rencanakan, seperti halnya saat Putera Mahkota Kerajaan Saudi Muhammad bin Salman berkunjung ke AS untuk pertama kalinya pada tanggal 20 Maret 2018 lalu. Kunjungan ini sangat disambut oleh Presiden AS Donald Trump. Kunjungan MBS tersebut akan membahas mengenai kelanjutan perjanjian kerjasama

tahun lalu di mana saat itu Trump yang berkunjung ke Saudi. Trump mengaku sangat antusias mengenai hubungan AS dengan Saudi. Ia beranggapan bahwa Saudi merupakan negara pembeli terbesar persenjataan dari AS. Selain itu, Saudi juga membeli berbagai jenis perlengkapan perang seperti kapal antiselam, berbagai model senjata, dan kendaraan tempur lainnya. Kunjungan MBS sendiri bertepatan dengan acara senat AS yaitu pengambilan keputusan bahwa AS akan berhenti ikut campur dalam urusan perang Yaman. Seperti yang dikutip di AlJazeera pada tanggal 21 Maret 2018 Trump mengatakan bahwa:

“The sale of military equipment contributes to creating jobs for 40 thousand Americans”
(Ivanova, 2018).

Kunjungan MBS ke AS diberikan kata sambutan oleh Trump dan ucapan terima kasihnya karena MBS bersedia hadir ke Negeri Paman Sam tersebut. dalam sambutannya Trump mengatakan bahwa:

“Saudi Arabia is a very rich nation and they will give some of their wealth to the United States. The country also provides hope in the form of employment and the purchase of the best military equipment in the world”

MBS sangat berterima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh AS saat kunjungannya tersebut, MBS pun membalas dengan beberapa kata:

“We have long been allied with the United States in the Middle East, more than 80 years”
(Arango, 2018).

6. Harga Minyak Turun dan Kasus Jamal Khashoggi

Pada 2018 akhir hubungan Saudi dan AS sedikit diuji oleh beberapa keadaan seperti minyak. Minyak merupakan komoditas yang diperjual belikan secara global. Di mana harga minyak sebagian dapat ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan saat ini serta sebagiannya lagi dapat ditentukan oleh harapan dan kekhawatiran mengenai perubahan masa mendatang dalam keseimbangan itu sendiri. Kerajaan Saudi merupakan negara besar penghasil minyak yang perekonomiannya sangat bergantung dengan benda tersebut. pada bulan Juni 2018 lalu, harga minyak anjlok dan menjadi masalah yang cukup berpengaruh bagi kelangsungan perekonomian kerajaan. Harga minyak yang menjadi acuan yaitu Brent turun sebesar 4,4% atau sekitar US\$ 3,6 di bawah harga bulan Juni. Turunnya harga minyak ini terjadi sejak musim panas 2014. Para pakar mengatakan salah satu faktor turunnya harga minyak bias di sebabkan oleh Produksi minyak AS dan Kanada yang mencapai level tertinggi selama 30 tahun. Mereka memproduksi sekitar 9 juta barel per hari. AS dan Kanada yang memiliki teknologi *Fracking* memungkinkan pengeboran minyak yang sebelumnya tidak dapat dijangkau (BBC, 2014).

Arab Saudi kerap kali disalahkan apabila harga minyak naik ataupun turun. Sebagai pemimpin OPEC, untuk menanggapi kasus harga minyak turun tersebut di mana salah satu faktor pemicu ialah naiknya produksi minyak milik AS. Saudi bertekad mengurangi ekspor minyak ke AS guna menetralsir ketidakstabilan harga minyak 2014 lalu. Tentu hal tersebut menjadi masalah baru ketidaksepahaman dua negara tersebut. Sedangkan Trump terus mendesak OPEC agar produksi minyak pulih seperti semula. Konflik kepentingan antara Saudi dan AS ini masih berlanjut hingga muncul masalah baru mengenai pertanyaan penerapan Hak Asasi Manusia

(HAM) di Saudi yaitu pemunuhan Jurnalis Jamal Khashoggi (CNN, 2018).

Jurnalis Jamal Khashoggi seorang kritikus Kerajaan Saudi dinyatakan menghilang pada tanggal 2 Oktober 2018 lalu ketika mengunjungi konsulat Arab Saudi di Turki. Dugaan penuh dugaan dilemparkan kepada Saudi bahwa pihak kerajaanlah yang mengeksekusi Jurnalis tersebut karena terlalu mengkritik pihak kerajaan. Dengan hal tersebut Saudi banyak dikecam dunia internasional di mana Putera Mahkota MBS diakui telah mengetahui rencana pembunuhan Jurnalis tersebut. Banyak media-media di AS yang mengatakan bahwa pihak CIA meyakini bahwa Putera Mahkota Kerajaan lah yang memerintahkan pembunuhan terkait. Dunia internasional memandang tindakan Saudi tidak mencerminkan diterapkannya HAM sama sekali. Termasuk senat AS yang memberi saran kepada Presiden Donald Trump untuk secepatnya memberikan hukuman berat kepada negara kaya minyak tersebut. sedangkan Saudi memberikan dalih bahwa kematian Jurnalis tersebut karena kecerobohan agen intelejen Kerajaan dan membantah bahwa putera mahkota tidak ada sangkutannya dengan pembunuhan tersebut (BBC, Jamal Khashoggi: All you need to know about Saudi journalist's death, 2018).

Respon yang diberikan oleh Trump pun sangat mengejutkan dunia. Pemimpin AS tersebut dengan tegas memberikan dukungan terhadap negara sekutunya Saudi. Walaupun dunia internasional sedang mengecam Saudi. Tidak ada yang tahu mengapa Trump malah memberi kelonggaran bagi Saudi, namun pasti ada maksud tertentu yang diinginkan Presdien AS tersebut. saat ditemui oleh Fox News, Trump memberikan pendapat bahwa:

“Saudi Arabia is a loyal partner who has agreed on an exceeding record investment

value in the US. It's possible that the Crown Prince knows of the tragic event. Maybe he did it and maybe not! And the CIA findings have not concluded 100% about the alleged links between Saudi Arabia's crown prince and the murder”

Trump pun juga beberapa kali memberikan tanggapan yang menyiratkan bahwa ia tidak ingin memulai masalah dengan Saudi seperti:

"The world is a very dangerous place! But Saudi Arabia is an US ally against Iran. The Saudi kingdom has spent billions of dollars in leading a war against Radical Islamic Terrorism, while Iran has killed many US and other innocent people throughout the Middle East”

Pernyataan mengejutkan yang diberikan oleh Trump ini pun membahas pula mengenai perjanjian investasi Saudi ke AS dan pembelian senjata, lalu ia menambahkan:

"If we foolishly cancel this contract, Russia and China will be very large beneficiaries .Despite acknowledging the "terrible" murder of Jamal Khashoggi is a terrible thing, but we might never know about all the facts about his death. The United States intends to remain a loyal partner of Saudi Arabia to ensure the interests of our country, Israel and all other partners in the region." (BBC, Trump 'mementingkan hubungan' dengan Saudi meski ada pembunuhan Khashoggi, 2018).

Mengenai hal ini, Saudi berterima kasih kepada AS atas dukungan yang diberikan. Sedangkan kasus Khashoggi masih berjalan dengan tuduhan Saudi

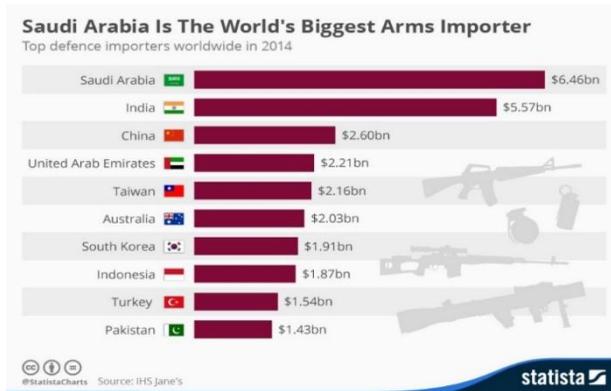
sebagai dalangnya. Kemudian pihak Saudi pun masih dengan tegas menolak tuduhan tersebut (BBC, Jamal Khashoggi: All you need to know about Saudi journalist's death, 2018).

C. Kerjasama Arab Saudi dan Amerika Serikat Merupakan Hal Vital

Hubungan Arab Saudi dan AS mengacu pada hubungan kerjasama yang vital di berbagai bidang. Uang Saudi yang diberikan kepada AS untuk membeli persenjataan milik AS mampu menghasilkan pekerjaan bagi AS. Di mana kerjasama persenjataan dengan Saudi dan AS inilah yang membuat Raja Salman masih memandang AS sebagai kawan. Sebaliknya bagi AS, hal tersebut juga menguntungkan pasalnya pembelian persenjataan Saudi dari AS tidak main-main jumlahnya. Bahkan Presiden Donald Trump pun tidak menghiraukan seruan dari Kongres untuk menghentikan ekspor senjata ke Saudi setelah adanya kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi tahun 2018 lalu. Walaupun Saudi banyak dikecam oleh dunia internasional mengenai kasus tersebut, Trump malah memberikan dukungan dengan berkata:

"I don't like the concept of stopping a \$ 110 billion investment in the United States, All they will do is say, 'It's okay. We don't have to buy it from Boeing. We don't have to buy it from Lockheed. We don't have to buy it from Raytheon and all these big companies. We will buy it from Russia. We will buy it from China"

Gambar 2.3 Arab Saudi merupakan negara importir senjata terbesar di dunia pada tahun 2014

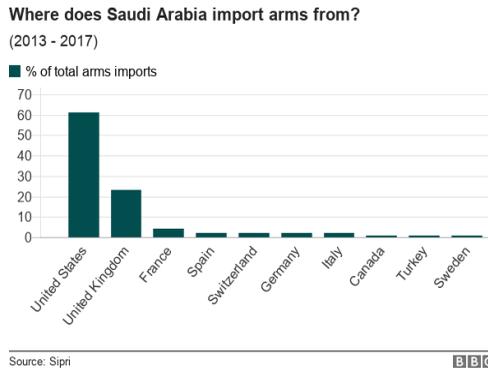


Sumber: Chughtai, A. (2017, May 18). *US-Saudi Relations: A timeline*. Retrieved December 1, 2018, from www.aljazeera.com:
<https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2017/05/saudi-relations-timeline-170518112421011.html>

Karena, pilihan Saudi untuk membeli senjata sangat banyak dari negara-negara di dunia, misalnya ialah China dan Rusia. Dan AS tau hal tersebut. dari pada harus kehilangan sekutu setia dari Timur Tengah, maka AS lebih baik mencari tindakan aman (Hennigan, 2018)

Walaupun hubungan Saudi dan AS menyangkut kerjasama di beberapa bidang seperti minyak, militer, infrastruktur, dll. Namun yang paling menyumbang dana terbesar ialah di minyak dan militer. Kerajaan Saudi membeli lebih banyak senjata dari pada negara manapun. Dan pembelian senjata Saudi dari AS dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Keuntungan yang didapat AS pun tidak tanggung-tanggung. Sebaliknya, Saudi juga mendapat keamanan dan senjata-senjata bermacam-macam jenisnya (Chughtai, 2017).

Gambar 2.4 Impor senjata Arab Saudi paling besar berasal dari AS pada tahun 2013-2017



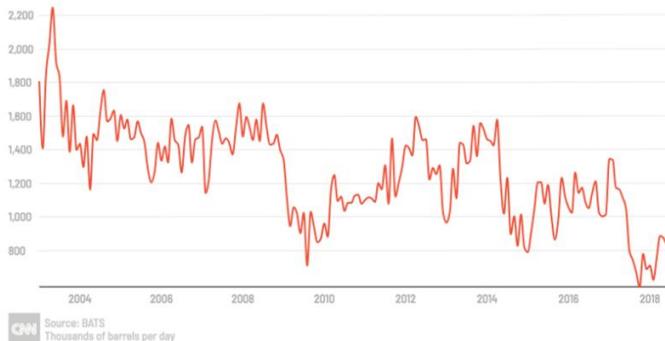
Sumber: Bowen, A. (2017). *US-Saudi Relations: A New Footing for an Old Relationship*. Retrieved March 1, 2019, from American Enterprise Institute: <https://www.aei.org/publication/us-saudi-relations-a-new-footing-for-an-old-relationship>

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pembelian senjata dari AS yang diukur dari tahun 2013 hingga 2017 secara berturut-turut yang paling besar ialah Saudi sebesar 18%. Sedangkan negara-negara lain seperti UAE, Australia, Taiwan, Iraq, dan India hanya sekitar 5% hingga 7% saja. Bahkan Saudi menjadi tempat yang spesial karena pentagon memiliki tim anggota layanan AS yang berbasis di Riyadh di mana mendedikasikan sepenuhnya manajemen dan administrasi penjualan militer asing Arab Saudi (Khoury, 2018)

Hubungan Kerajaan Saudi dan AS yang dekat karena minyak ini masih mempertahankan hal tersebut. Jatuh bangun hubungan keduanya tak menyebabkan keduanya benar-benar bermusuhan. Seperti contohnya dalam hal minyak. Keduanya

sempat akrab karena minyak, terdapat konflik hingga terjadi embargo minyak oleh Saudi kepada AS, hingga keduanya saling bekerjasama dalam hal minyak kembali (Chughtai, 2017).

Gambar 2.5 Dinamika impor minyak AS dari Saudi



Sumber: CNN. (2018, October 16). *Harga Minyak Terkerek Memanasnya Hubungan Arab-AS*. Retrieved March 4, 2019, from CNN Indonesia:

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181016064213-85-338738/harga-minyak-terkerek-memasnya-hubungan-arab-as>

Dari data di atas membuktikan bahwa hubungan minyak keduanya tetap berjalan walaupun ada penurunan. Turunnya ekspor minyak Saudi ke AS selain karena beberapa konflik yang terjadi di antara keduanya juga karena adanya revolusi minyak serpih buatan AS yang menyebabkan negara tersebut menjadi pemroduksi minyak tertinggi dunia. Walaupun begitu, Saudi masih melakukan ekspor minyak sebanyak 7,9 juta barel minyak mentah asing per hari. Sebagai pengeksport minyak terbesar di dunia, permintaan minyak dari Saudi pun semakin melonjak dari waktu ke waktu. Dan negara tujuan ekspor minyak Saudi pun banyak, hal tersebut menjadikan

Saudi tidak begitu khawatir bila AS akan menghentikan impor minyaknya dari Saudi. Meskipun produksi minyak AS melonjak karena minyak serpih dan adanya teknologi *Fracking*, menurut statistik pemerintah terbaru sejak bulan Juli 2018 AS masih mengimpor minyak mentah asing dari Saudi sebanyak 876.000 barel minyak per hari dan masih menjadikan Saudi di posisi kedua pengekspor minyak terbesar ke AS setelah Kanada (Egan, 2018)

Saudi mendapati bahwa AS masih akan bergantung dengan minyak mentah milik Saudi. Karena, minyak serpih yang diproduksi dari Permian Basin di Texas dan tempat lain ialah campuran yang sangat ringan dan tidak cocok dengan kilang Coast Coast di AS. Oleh karena itu kilang-kilang minyak yang sudah berumur puluhan tahun di AS tersebut membutuhkan campuran minyak mentah tingkat sedang dan berat yang dimiliki oleh Saudi. Dalam hal ini, Saudi merupakan pasangan yang sempurna untuk keberlangsungan kilang-kilang minyak di AS. Selain itu, Arab Saudi merupakan negara yang memiliki pengaruh yang tidak tertandingi di pasar minyak dunia. Karena Saudi dikenal sebagai bank sentral minyak. Hanya kata-kata yang dikeluarkan oleh Menteri Perminyakan Saudi lah yang dapat menyebabkan harga minyak turun ataupun naik. Tidak bisa dipungkiri bahwa Saudi merupakan negara hebat karena minyak yang dimilikinya. Namun dengan adanya wacana *Saudi Vision 2030* yang dicanangkan oleh Putera Mahkota MBS, di mana Saudi ingin berhenti bergantung pada penjualan minyak sebagai pendongkrak ekonomi dan mulai mendiversifikasikan ekonomi kerajaan. Saudi tak hanya membutuhkan AS sebagai bantuannya. Kerajaan pun membutuhkan negara dengan perekonomian besar di belahan dunia lain untuk memaksimalkan perekonomiannya. Dan salah satu sasarannya ialah negara dari Timur yaitu China. Tak hanya dengan AS, Saudi ingin menggandeng kedua negara dengan perekonomian besar untuk mewujudkan kepentingan negaranya khususnya dalam bidang ekonomi (Phillip Brown, 2018).